

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa yang akan datang, akan sangat diperlukan adanya lingkungan permukiman yang sehat. Dari aspek persampahan, maka kata sehat akan berarti sebagai kondisi yang akan dapat dicapai bila sampah dapat dikelola secara baik sehingga bersih dari lingkungan permukiman dimana manusia beraktifitas di dalamnya (Permen PU nomor: 21/PRT/M/2006).

Visi pengembangan sistem pengelolaan persampahan Departemen Kimpraswil, yaitu **“Permukiman Sehat Yang Bersih Dari Sampah”** menggambarkan keinginan terwujudnya suatu kondisi lingkungan yang baik dan sehat. Secara umum, menurut Peraturan Menteri PU nomor: 21/PRT/M/2006, daerah yang mendapatkan pelayanan persampahan yang baik akan dapat ditunjukkan memiliki kondisi sebagai berikut:

- a. Seluruh masyarakat memiliki akses untuk penanganan sampah yang dihasilkan dari aktifitas sehari-hari, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya.
- b. Masyarakat memiliki lingkungan permukiman yang bersih karena sampah yang dihasilkan dapat ditangani secara benar.
- c. Masyarakat mampu memelihara kesehatannya karena tidak terdapat sampah yang berpotensi menjadi bahan penularan penyakit seperti diare, tipus, disentri, dan lain-lain; serta gangguan lingkungan baik berupa pencemaran udara, air atau tanah.
- d. Masyarakat dan dunia usaha/swasta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan sehingga memperoleh manfaat bagi kesejahteraannya.

Persoalan lingkungan yang selalu menjadi isu besar di hampir seluruh wilayah perkotaan adalah masalah sampah (Febriane dalam Kompas 10 Januari 2004). Arif Rahmanullah dalam Kompas, 13 Agustus 2003 mengatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di kota dimungkinkan menjadi daya tarik luar biasa bagi penduduk untuk hijrah ke kota (urbanisasi). Akibatnya jumlah penduduk semakin membengkak, konsumsi masyarakat perkotaan melonjak, yang pada akhirnya akan mengakibatkan jumlah sampah juga meningkat.

Pertambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan akan menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan (Tuti Kustiah, 2005:1). Lebih jauh lagi, penanganan sampah yang tidak komprehensif akan memicu terjadinya masalah sosial, seperti amuk massa, bentrok antar warga, pemblokiran fasilitas TPA (Hadi, 2004)

Pertumbuhan jumlah sampah di kota-kota di Indonesia setiap tahun meningkat secara tajam. Sebagai contoh di Kota Bandung. Di kota ini, pada tahun 2005 volume sampahnya sebanyak 7.400 m³ per hari; dan pada tahun 2006 telah mencapai 7.900 m³ per hari. Selain itu, di Jakarta, pada tahun 2005 volume sampah yang dihasilkan sebanyak 25.659 m³/hari; dan pada tahun 2006 telah mencapai 26,880 m³/hari. (Suganda dalam Kompas, 30 Nopember 2006).

Kemampuan Pemerintah untuk mengelola sampah hanya mencapai 40,09% di perkotaan dan 1.02% di perdesaan (Tuti Kustiah : 2005:3). Sehingga diperlukan kebijakan yang tepat agar sampah yang di perkotaan khususnya, tidak menjad bom waktu di masa mendatang.

Saat ini hampir seluruh pengelolaan sampah berakhir di TPA sehingga menyebabkan beban TPA menjadi sangat berat, selain diperlukan lahan yang cukup luas, juga diperlukan fasilitas perlindungan lingkungan yang sangat mahal. Semakin banyaknya jumlah sampah yang dibuang ke TPA salah satunya disebabkan belum dilakukannya upaya pengurangan volume sampah secara sungguh-sungguh sejak dari sumber (Tuti Kustiah : 2005:3).

Kota Yogyakarta sebagaimana kota besar lain di Indonesia, jumlah penduduknya juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS, diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2001 sebanyak 505.949 jiwa dan meningkat menjadi 534.074 jiwa pada tahun 2007. Rata-rata pertumbuhan penduduknya sebesar 0,91 % pertahun (BPS Kota Yogyakarta, 2007). Meningkatnya jumlah penduduk akan menyebabkan meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan.

Pertumbuhan volume sampah di Kota Yogyakarta berdasarkan data tercatat 531 m³ per hari pada tahun 2001, kemudian meningkat menjadi 1.571 m³ per hari pada tahun 2007. Atau dengan kata lain jumlah sampah di Kota Yogyakarta meningkat rata-rata 11,53% per tahun (DLH Kota Yogyakarta, 2008).

Di Kota Yogyakarta, ternyata rata-rata pertumbuhan jumlah sampah jauh melebihi pertumbuhan jumlah penduduk. Hal ini menjadi alasan kuat bahwa masalah sampah merupakan masalah utama yang harus dipecahkan baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang.

Selain masalah volume sampah yang terus meningkat, Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini juga menghadapi berbagai persoalan terkait penanganan sampah, berupa keterbatasan biaya operasional dan sarana prasarana pengelolanya. Besarnya anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menangani sampah pada tahun 2001 sebesar Rp 2.683.950.000. Meningkat rata-rata 11,25 % per tahun, sehingga pada tahun 2007 biaya yang dikeluarkan pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp 5.073.069.000. Dari anggaran tersebut jumlah sampah yang tertangani baru mencapai 85% dari total sampah yang dihasilkan (DLH Kota Yogyakarta, 2008).

Masalah infrastruktur juga menjadi kendala dalam pengelolaan sampah Kota Yogyakarta. Sebagai contoh, Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Piyungan sebagai tempat pembuangan sampah Kota Yogyakarta, akan segera berakhir masa pakainya pada tahun 2010. Sementara itu, sampai saat ini belum ditemukan lokasi TPA pengganti yang memenuhi syarat (Satker Pengembangan Pengelolaan Persampahan, 2005).

Secara umum kebijakan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta masih mengikuti paradigma lama, dimana sampah dikumpulkan, kemudian diangkut dan akhirnya dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Piyungan, Bantul. Pada sistem tersebut, semakin banyak sampah yang harus dikelola maka biaya yang harus dikeluarkan juga semakin besar.

Secara teoritik, untuk mengatasi persoalan sampah mengharuskan dilakukannya pergeseran pendekatan dari pendekatan ujung-pipa (*end-pipe of solution*) ke pendekatan sumber. Dengan pendekatan sumber, maka sampah ditangani pada hulu sebelum sampah itu sampai ke tempat pengolahan akhir (hilir) (Syafurudin, 2004:1)

Pada prinsipnya, pendekatan sumber menghendaki dikurangnya produk sampah yang akan dikirim ke tempat pengolahan akhir. Cara yang dapat ditempuh untuk mengurangi sampah antara lain pemilahan sampah dan penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) atau pengurangan, penggunaan kembali dan mendaur ulang sampah (Syafuruddin, 2004:1).

Permukiman di perkotaan merupakan produsen sampah terbesar, kira-kira 60-70 % dari total timbulan sampah (Tuti Kustiah, 2005:3). Demikian juga halnya di Kota Yogyakarta, sumber sampah yang dominan berasal dari sampah rumah tangga (permukiman), yaitu mencapai 62% dari total jumlah sampah yang dihasilkan (DLH Kota Yogyakarta, 2005).

Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup pasal 16 mengamanatkan bahwa masyarakat bertanggungjawab sebagai produsen timbulan sampah. Diharapkan masyarakat sebagai sumber timbulan yang beresiko sebagai sumber pencemar, untuk ikut serta dalam sistem pengelolaan sampah (Syafuruddin, 2004:1).

Upaya strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengatasi persoalan sampah adalah dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan melakukan reduksi sampah di sumbernya (rumah tangga). Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk *pilot project* pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Tujuan *pilot project* pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah untuk mendapatkan masukan bagaimana sampah rumah tangga dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat di tingkat sumber, sehingga dapat mengurangi jumlah timbulan sampah yang harus dikelola di TPSA (DLH, 2005).

Pada saat ini, komunitas pengelola sampah yang dijadikan *pilot project* oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah komunitas pengelola sampah Gondolayu Lor. Secara administratif, wilayah ini merupakan wilayah RW 10 Kel. Cokrodiningratan, Kec. Jetis. Kawasan ini terletak di jantung Kota Yogyakarta, tepatnya di sebelah Timur Daerah Tugu, dan merupakan permukiman padat.

Pengkajian mengenai pengelolaan sampah yang diujicobakan menjadi kajian yang sangat menarik dan strategis, sebagai sebuah upaya untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Yogyakarta, terkait dengan jumlah sampah yang semakin meningkat. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam rangka menemukan model yang paling tepat tentang pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat yang dapat diterapkan di perkotaan pada umumnya, dan Kota Yogyakarta pada khususnya.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Dengan melihat latar belakang di atas, timbul pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta ?
2. Apa problematika yang dihadapi pada pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta?
3. Apa rekomendasi yang diberikan untuk menyempurnakan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian (*research question*) yang muncul dengan latar belakang seperti yang diuraikan di atas. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta.

2. Menginventarisir problematika pada pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta
3. Memberikan rekomendasi untuk menyempurnakan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta.

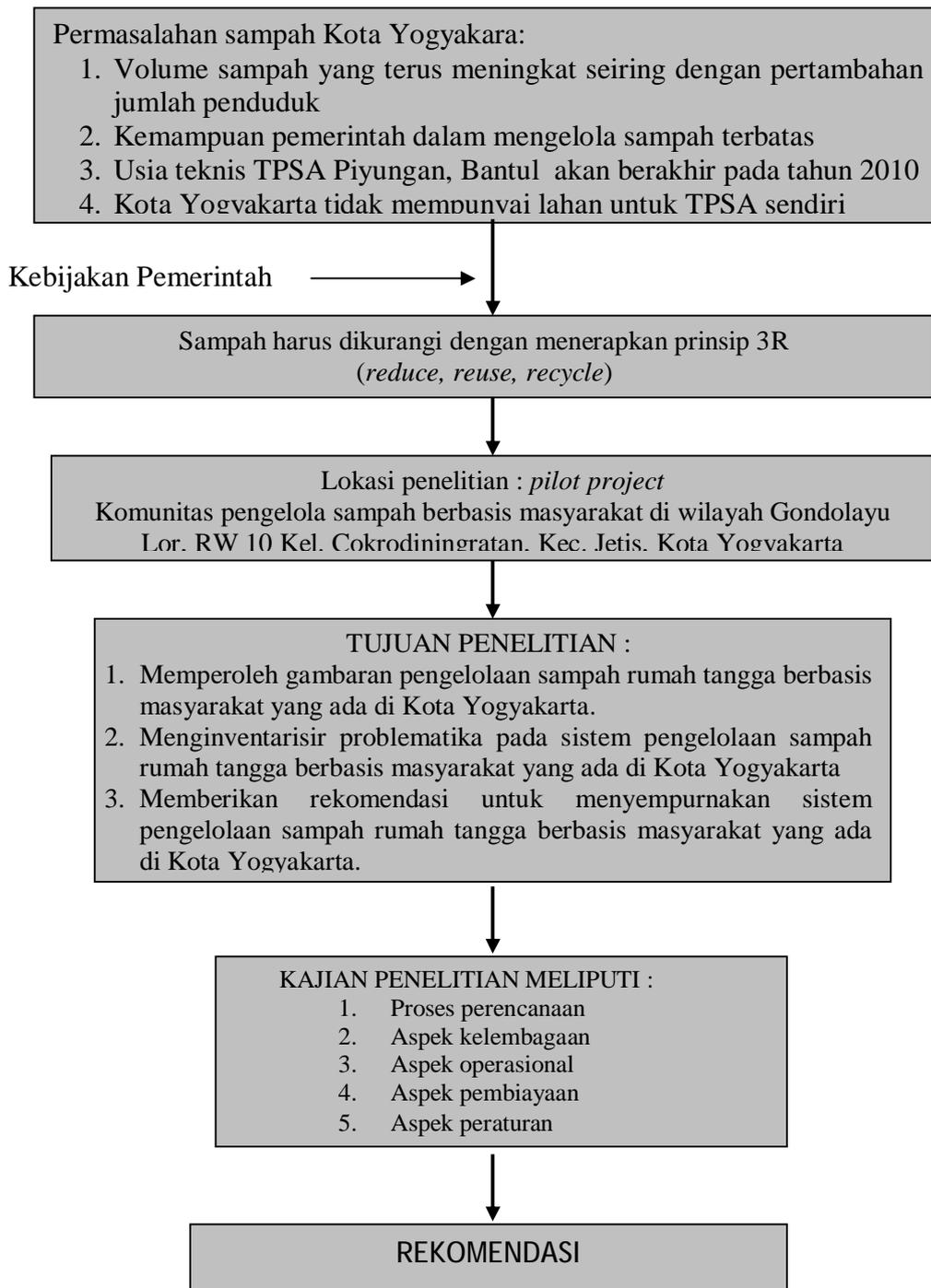
1.4. MANFAAT PENELITIAN

1. Sebagai bahan referensi untuk penyempurnaan sistem pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta.
2. Sebagai sumbang saran dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan di Kota Yogyakarta, khususnya dalam hal kebersihan dan kesehatan lingkungan.
3. Sebagai bahan kajian penelitian dalam bidang pengelolaan sampah yang mengikutsertakan peran aktif masyarakat.

1.5. DEFINISI OPERASIONAL

1. **Sampah.** Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (rujukan: UU no 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah).
2. **Sampah Rumah Tangga.** Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan sampah rumah tangga adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, yang terjadi pada skala rumah tangga.
3. **Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.** Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pengelolaan sampah rumah tangga adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga (rujukan: UU no 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah).
4. **Berbasis Masyarakat**
Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan berbasis masyarakat adalah pelibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

1.6 KERANGKA PIKIR PENELITIAN



Gambar 1.1
Kerangka Pikir Penelitian